

## DAFTAR RUJUKAN

- Ardiyose. 2013. Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Arif, Bactiar dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Edisi Ketiga : Erlangga.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2019 . *Pencairan Dana*. Kementerian Keuangan.<https://djpb.kemenkue.go.id/portal/id/layanan/kppn/pencairan-danq.html> (diakses pada 18 April 2020)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan.(2019). *Tugas dan Fungsi*. Kementerian Keuangan <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/profil-organisasi/tugas-dan-fungsi.html> (diakses pada 18 april 2020)
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2019. *Pengertian dana*. (<https://kbbi.web.id/dana>, diakses tanggal 23 April 2020)
- Kementerian Keuangan. 2013. *Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana*. <https://www.kemenkeu.go.id/page/penerbitan-surat-perintah-pencairan-dana/> (diakses pada 23 April 2020)
- Pahlevi. (2019). *Manfaat Prosedur*. Dikutip 24 April 2020 dari Pengertian Prosedur: <https://www.pahlevi.net/pengertian-prosedur/>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2016. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2005. Jakarta. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2012. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Prayudi, Aristia. 2018. Akuntansi Pemerintahan. 2018. Buku Ajar.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 8 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”

UU RI. 1945. “Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Pasal 23

Wikiapbn.2015\_ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

<https://www.wikiapbn.org/kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/>  
(diakses pada 17 april 2020)

